BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literature-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Adapun pengertian sistem pengendalian intern yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) mengatakan bahwa:

> "Sistem pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan".

Sementara menurut Mahmudi (2011:252) pengertian sistem pengendalian internal sebagai berikut:

> "Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus".

Sedangkan menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) sebagai berikut:

"Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya".

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses pengendalian berupa tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dan jajarannya dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian inten harus diterapkan dengan baik jika ingin dicapai esensinya, dan untuk itu perlu diterapkan bahwa manajemen puncaklah yang memiliki peran terbesar disini. Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) sebagai berikut:

a. Untuk melindungi asset (termasuk data) negara.
b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
e. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Intern

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) dan V. Wiratna Surjaweni (2015:71) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian
b. Penilaian Risiko
c. Kegiatan Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan

Adapun Penjelasan Komponen Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian.
   Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:
   a. Penegakan integritas dan nilai etika.
   b. Komitmen terhadap kompetensi.
   c. Kepemimpinan yang kondusif.
   d. Pembentukan sturktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
   e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
   f. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
   g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
b. Penilaian Risiko.
   Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasibaik dari luar maupun dari dalam. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:
   a. Identifikasi Resiko. Mengindentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

b. Analisis Resiko. Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

c. Kegiatan Pengendalian.
   Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain:
   a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
   b. Pembinaan sumber daya manusia.
   c. Pengendalian atas peneglolaan sistem informasi.
   d. Penetapan review atas indikator dan ukuran kerja.
   e. Pemisahan fungsi.
   f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
   g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
   h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
   i. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi.
   Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi yang disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan.
   Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomndasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memeberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Agar keuangan daerah ini dapat dipergunakan dengan baik maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel. Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2015:6) menyatakna bahawa:

> "Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah".

Adapun definisi Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Baldric (2015:11) adalah:

> "Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah."

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:330) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

> "Suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pegawasan terhadap keuangan daerah".

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas keuangan daerah.

2.1.2.2 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Baldric (2015:11) Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan bertanggungjawab dengan

memeperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Berikut uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah:

a. Tertib.
   Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang dudukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertnggungjawabkan.
b. Taat pada peraturan perundang-undangan.
   Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
c. Efektif.
   Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
d. Efisien.
   Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
e. Ekonomis.
   Pemerolehan masukan (*input)* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
f. Tranparansi.
   Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
g. Bertanggungjawab.
   Perwujudan kewajiban seseorang untuk memepertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
h. Keadilan.
   Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
i. Kepatuhan.
   Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
j. Manfaat.
   Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporann, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Dadang Suwanda (2013:44) Siklus pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen

yang dikenal selama ini. Berikut merupakan Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan
d. Pelaporan
e. Pertanggungjawaban
f. Pengawasan

Adapun penjelasan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. Perencanaan.
   Pimpinan instansi pemerintah bertanggungjawab dan memastikan Recana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
b. Pelaksanaan.
   Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pemimpin instansi pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
c. Penatausahaan.
   Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan. Dalam penyelenggaraan tugasnya, instansi mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas, mencangkup penyediaan dana dan pengolahan data untuk penyususnan rencana kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksanan administrasi umum, penyelenggaraan kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan.
d. Pelaporan.
   Pemimpin instansi bertanggungjawab untuk mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyususnan laporan pengelolaan keuangan daerah agar akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya.
e. Pertanggungjawaban.
   Pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dibuat

sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah selama periode tertentu. Ada dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

f. Pengawasan.
Pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dan praktik-praktik tata kelola keuangan daerah dilaksanakan secara rutin dan terencana. Hal ini menunjukkan agar pelakasanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetepkan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mengalami dua kali pengawasan yaitu dari pihak internal (APIP) dan pihak eksternal (BPK)

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Adapun pengertian kualitas dan laporan keuangan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:146) didefnisikan sebagai berikut :

> “Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan”.

Pengertian Laporan Keuangan yang dikemukakan oleh mahmudi (2011:143) adalah:

> “Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak - pihak yang akan

menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Adapun menurut Fahmi (2011:2) pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

"Merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:9) sebagai berikut:

"Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan".

Dari pengertian teori-teori diatas maka dapat disimpulkan laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang tertentu yang digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan keuangan

Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Adapun menurut Nurmalia Hasanah & Acmad Fauzi (2016:35) tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Meneydiakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil ang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencangkup kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keungan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagau akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Nurmalia Hasanah & Achmad Fauzi (2016:37) adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Adapun penjelasan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Relevan.
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:
   a) Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).*
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).*
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu.
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a. Penyajian jujur.
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi *(verifiability).*
Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas.
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang–undangan (Fitria Ayu Lestari Niu dkk, 2014). Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin tingginya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik (Muslikha Diawati, 2015).

Laporan keuangan merupakan sebuah media informasi akuntansi menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting (Akhmad Syarifudin, 2014).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan (I Putu dan I Wayan, 2014). Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lepas dari akuntansi sebagai bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Kualitas Laporan keuangan merupakan *output* dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam prosesnya memerlukan suatu sistem akuntansi karena laporan keuangan

akan dibuat periodik atau berulang. Oleh sebab itu memahami sistem akuntansi menjadi sangat penting untuk dapat dihasilkan sebuah laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel guna tercapainya *good government governance*. Pemahaman dimaksud hanya pada tataran konsep dan teknis akuntansi namun juga sampai kepada pemahaman sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah yang lebih luas seperti peraturan perundangan yang menaungi pengelolaan keuangan negara dan daerah itu sendiri (Abdul Halim dkk, 2010:4).

Adapaun menurut Anindita Primastuti (2006) menyatakan bahwa Untuk memenuhi kriteria keandalan dan relevansi suatu laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian intern yang baik. Dengan sistem pengendalian intern yang berkualitas maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bisa terhindar dari penyelewengan, resiko salah prosedur, dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.2.1 Hubungan Peran Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Tantriani Sukmaningrum (2011:38) pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

> ”Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.”

Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Sistem Pengendalian Inten Pemerintahan (SPI) mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.2 Hubungan Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan tang terususn secara sitematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

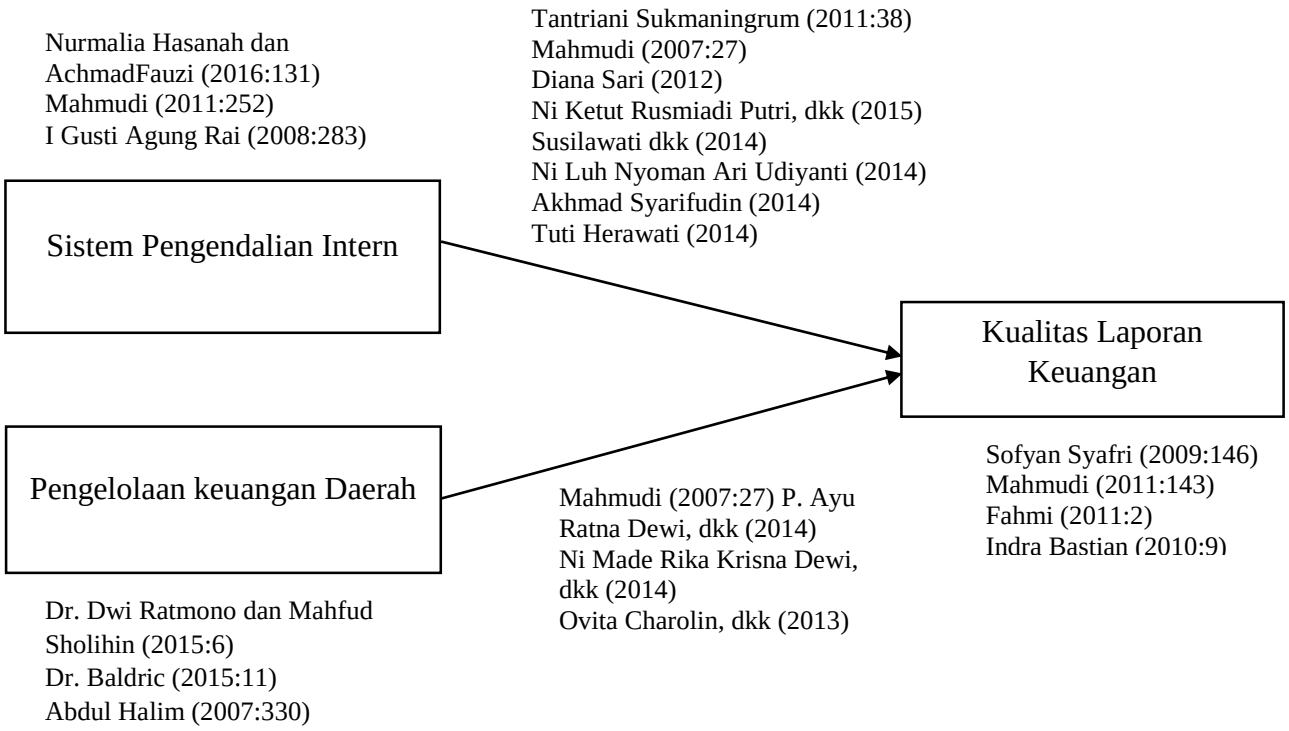
Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa:

> "Kualitas dari hasil (*outcame*) pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan".

Menurut Abdul Halim dkk (2010:4) Pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lepas dari akuntansi sebagai bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan *output* dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam prosesnya memerlukan suatu sistem akuntansi karena laporan keuangan akan dibuat periodik atau berulang. Oleh sebab itu memahami sistem akuntansi menjadi sangat penting untuk dapat dihasilkan sebuah laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel guna tercapainya *good government governance*. Pemahaman dimaksud hanya pada tataran konsep dan teknis akuntansi namun juga sampai kepada pemahaman sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah yang lebih luas seperti peraturan perundangan yang menaungi pengelolaan keuangan negara dan daerah itu sendiri.

Jadi pengelolaan keuangan daerah itu supaya berkualitas tergantung pada setiap tahap pengeleloaannya salah satunya dilihat dari hasil tahap pelaporannya. Pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lepas dari akuntansi sebagai bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan, dalam prosesnya memerlukan suatu sistem akuntansi karena merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang

terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_1: Peran Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_2: Pengelolaan Keungan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.